

**MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK KYAI:
*Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik
Massa NU PKB dan PPP***

Edi Kusmayadi, Subhan Agung dan M. Ali Andrias

ABTRAK

Penelitian ini mengkaji model kepemimpinan politik kyai, Peran kyai dalam merubah perilaku politik massa Nahdlatul Ulama (NU) dalam massa NU Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan massa NU Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Tasikmalaya. Fenomena secara sosio-historis Tasikmalaya dengan beragam kultur dan ekspresi keIslaman beragam. Tradisi NU sangat kental adalah ketundukannya terhadap kyai. Dalam konteks itulah penelitian ini berusaha menggali model kepemimpinan yang diperankan ulama atau kyai di Tasikmalaya dalam merubah atau menggeser perilaku politik massa NU PPP dan PKB. Dengan menggunakan metode kualitatif ekspalanatif, hasil penelitian ini bahwa perubahan preferensi perilaku politik massa NU PKB dan PPP sangat ditentukan oleh kepemimpinan politik tradisional kyai. Titah kyai NU terhadap massa NU PKB dan PPP menjadi pedoman bagi perilaku politik massa NU. Model kepemimpinan pada Kyai NU adalah model kepemimpinan yang menyerupai kharismatik, mensyaratkan pengikutnya tunduk dan patuh kepada kyai, walaupun kyai sesungguhnya bersikap egaliter dan demokratis.

Kata Kunci : Kepemimpinan Tradisional Kyai, Perilaku Politik, Massa NU

A. PENDAHULUAN

Konstelasi politik Indonesia era reformasi ini secara tidak langsung telah merubah pandangan masyarakat terhadap politik. Masyarakat memperoleh kebebasan dan hak politiknya. Proses transisi demokrasi melalui pemilu langsung, merupakan preferensi yang membebaskan masyarakat lebih rasional, cerdas, dan transparan memilih pandangan politik yang sesuai dengan hati nurani rakyat, terutama *platform* dan program politik yang jelas demi kemaslahatan bersama. Namun tidak bisa dilepaskan oleh pemikiran politik dan budaya politik yang mempengaruhinya.

Mengacu penelitian Herbeth Feith dan Lance Castle (1988) pada tahun 1945-1965, ada lima aliran pemikiran politik yakni Nasionalisme Radikal, Islam, Tradisional Jawa, Sosialime, dan Komunis. Kelima aliran pemikiran politik ini sedikit banyak telah mempengaruhi dinamika dan sistem politik di Indonesia hingga beberapa dekade terakhir. Meskipun pemikiran politik kita mengacu konsep dan ideologi Pancasila dan demokrasi, namun pada era reformasi ini beberapa pemikiran yang sudah diungkapkan Feith dan Castle masih dianggap relevan mempengaruhi politik masyarakat Indonesia

Arus pemikiran yang terus mengisi dinamika politik di Indonesia hingga saat ini adalah pemikiran politik Islam (tradisional maupun modernis), yang secara

langsung berpengaruh pada pola kehidupan yang lebih luas ke dalam struktur masyarakat, yang kemudian dipahami dan diinternalisasikan ke dalam sebuah konsep dan sistem politik Indonesia. Kajian ini menjadi lebih menarik ketika pemikiran politik Islam sudah sejak lama mewarnai perpolitikan di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia membentuk pemerintahan (negara). Namun realitasnya politik Islam terutama parpol (parpol) yang menganut azas Islam tidak sepenuhnya berkuasa atau mendominasi dalam pemerintahan, bahkan bisa dikatakan mengalami pasang surut hingga Reformasi ini.

Mungkin yang bisa menjadi gambaran maupun cerminan dalam kajian ini adalah pemikiran politik Islam tradisional, pengikut *ahlusunnah wal jamaah* (aswaja) yang dinaungi oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Pendirian NU awalnya, hanya bertekad berjuang demi tegaknya agama Islam, dan berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran dan memperdalam Islam kepada masyarakat Indonesia. Bukanlah pandangan untuk meraih kekuasaan politik, atau menguasai pemerintahan Indonesia. walau demikian bukan berarti sikap NU mengabaikan persoalan politik, apalagi masalah bangsa dan negaranya.

Keterlibatan NU dalam sejarah perpolitikan Indonesia bisa dilacak pada studi yang dilakukan Deliar Noer (1987 dan 1996) dan A. Syafii Maarif (1987, 1988). Politik NU seringkali mengambil posisi “*opportunis*” pada masa kekuasaan Soekarno, meski kesimpulan Noer dan Maarif tidak sepenuhnya benar, karena menurut M.Ali Haidar (1994) sikap politik NU yang “*zig zag*” atau sulit diterka didasarkan atas pertimbangan kemaslatahan umat dan bangsa yang didasarkan pada *fikih* dan merujuk pada kaidah-kaidah *ushul fikih*.

Dinamika politik kaum nahdhiyin berlangsung hampir di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa sebagai basis utamanya. Sementara dalam penelitian ini kekuatan politik NU akan dikhususkan di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Menjelang pemilihan legislatif ataupun pemilukada di Tasikmalaya, ada hal yang menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan para kandidat calon kepala daerah atau wakil rakyat, yakni adanya sosok kyai NU yang menjadi pemimpin pesantren dan kyai NU di luar pesantren. Alasannya cukup sederhana, bahwa peran kyai sangatlah besar dan cukup vital dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat di Tasikmalaya, bahkan kepemimpinannya melebihi kapasitas seorang pemimpin legal formal seperti lurah atau camat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perpolitikan saat ini, kyai merupakan tokoh sentral sebagai *vote getter* (pengumpul suara) dalam pemilu, baik ruang lingkup nasional maupun politik. Acapkali kyai yang berpolitik tidak bisa lepas dari konflik kepentingan kepartaian dan agama, sehingga terjadi benturan yang melibatkan umat di belakangnya.

Penelitian tentang kepemimpinan dan perilaku politik kyai ini merupakan salah satu bagian penting dalam kajian ilmu politik, dan sering dijadikan kajian penelitian. Studi penelitian ini sangat urgen pada perhelatan politik di tingkatan lokal maupun nasional. Bahkan menjadikan tolok ukur bagi parpol maupun elit-elit politik ketika mengikuti perhelatan pesta demokrasi (pemilu) di Indonesia. Kajian penelitian ini sudah beberapa kali dilakukan untuk menambah khasanah

pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya peran sentral kyai dan organisasi Islam dalam politik di Indonesia.

Dalam tujuan penelitian ini menganalisis secara komprehensif tentang pengaruh peran dan perilaku kyai dalam perpolitikan di Tasikmalaya maupun Indonesia secara umum. Peran dan pengaruh kepemimpinan yang dimiliki kyai cukup vital dalam mempengaruhi (pergeseran) perilaku politik masyarakat, khususnya kaum nahdyyin dalam perhelatan pemilu di tingkat lokal maupun nasional. Hasil penelitian ini diharapkan melengkapi (modifikasi) model kepemimpinan tradisional dan agama. Bagaimana peran dan pengaruh model kepemimpinan ini menjadi sebuah acuan (referensi) sebagai model yang tepat dan mampu menjawab sebuah permasalahan atau mampu sebagai resolusi konflik kepentingan antara politik dan agama di Indonesia. Konsep dan model ini sebagai acuan penting dalam upaya menjaga kepentingan politik yang harmonis dan dinamis. Bahwa peran kepemimpinan ini tidak saja mampu mempengaruhi kepentingan politik, namun mampu menjaga harmonisasi politik masyarakat Indonesia.

Dari berbagai literatur untuk mendukung penelitian ini, acuan penting dalam penelitian ini adalah kajian-kajian teoritis untuk mendukung penelitian ini diantaranya tentang teori-teori Perilaku Politik, Teori Kepemimpinan, dan Konsep Sikap Politik, Acuan penting dalam penelitian ini adalah konsep dari Koentjaraningrat tentang kepemimpinan tradisional. Pemimpin dalam suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dalam dua hal penting yaitu sebagai kedudukan sosial dan juga sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan sosial pemimpin merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang (ketua adat, kyai, kepala, rektor, panglima dan lainnya). Pemimpin dalam kehidupan sosial memerlukan tiga unsur penting untuk dapat menjalankan kewajibannya dengan memuaskan, yaitu : (1), kekuasaan atau *power*; (2) wewenang, atau *authority* dan (3) popularitas. Dalam bahasa sehari-hari kekuasaan dan wewenang sering disamakan, namun sebenarnya dalam kajian ilmiah perlu dibedakan semisal contoh ada pemimpin yang sebenarnya tidak memiliki wewenang, tetapi mempunyai kekuasaan yang besar, sebaliknya ada pemimpin yang memiliki wewenang resmi, tetapi tidak mempunyai kekuasaan yang nyata.

Pemimpin dapat menimbulkan pengaruh terhadap yang dipimpinnya tanpa bisa dicegah (asimetris). Pengaruh tersebut disebabkan oleh sifat-sifat pemimpin. Sifat-sifat tersebut adalah : (1) Sifat-sifat yang disenangi oleh warga masyarakat pada umumnya; (2) Sifat-sifat yang menjadi cita-cita dari banyak warga masyarakat dan yang karena itu suka ditiru; (3) Keahlian yang diperlukan dan diakui oleh warga masyarakat; (4) Pengesahan resmi atau legitimasi. Pengesahan ini untuk bentuk masyarakat tertentu semisal suku adat ditetapkan berdasarkan hukum atau aturan adat yang bersangkutan; (5) Sifat keramat menurut pandangan umum dalam masyarakat yang bersangkutan; (6) Lambang-lambang pimpinan resmi yang telah ditentukan oleh adat dalam masyarakat; (7) Kemampuan untuk mempergunakan kemampuan fisik yang nyata. Koentjaraningrat menyebutkan tiga unsur

kepemimpinan dalam semua jenis masyarakat termasuk berlaku dalam masyarakat tradisional seperti komunitas adat, yakni : (1) kewenangan, (2) kekuatan dan (3) popularitas. *Pertama*, kewenangan adalah kekuasaan yang didapatkan seorang pemimpin berdasarkan pengesahan resmi atau legitimasi menurut suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh adat istiadat atau hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sikap politik NU pada tataran akar rumput, sudah barang tentu akan berbeda dalam tataran operasional pada kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik maupun pada pengamalan ajaran agama Islam, hal ini, disebabkan pokok-pokok pikiran tersebut tidak banyak kegiatan sosialisasi instruksi PBNU, sehingga tidak terinternalisasi di massa pendukung NU atau kaum Nahdhiyin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimanakah Model Kepemimpinan kyai dalam mempengaruhi pergeseran perilaku politik massa NU PPP dan NU PKB di Tasikmalaya dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti lazimnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung oleh data yang diperoleh. Sasaran penelitian ini adalah massa NU atau kaum nahdhiyin, pengurus partai PKB dan PPP, kader dan anggota partai PKB dan PPP Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Mathew B Miles dan Michael Huberman. Validitas data merupakan faktor yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data yaitu data sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Sikap dan Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP di Tasikmalaya

Dalam kajian penelitian yang sudah dilaksanakan dari awal tahun 2016 ini, tim penulis menganalisis dari data-data yang sudah diperoleh dari kaidah metode penelitian kualitatif di lapangan. Ada yang berbeda dengan sikap politik massa NU PKB dengan sikap politik massa NU PPP di Kota Tasikmalaya. Perbedaan dimaksud meskipun tidak dapat digeneralisasi, namun menjadi perhatian penulis terkait dengan ketaatan/loyalitas massa NU dari PKB, loyalitas dimaksud ialah ketaatannya pada ajaran bagi kaum nahdhiyin (yaitu empat bentuk sikap kemasyarakatan NU); Sikap *Tawassuth Wal-I'tidal* (tengah-tengah dalam hidup bersama serta selalu jujur), Sikap *Tasamuh* (toleran dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat), Sikap *Tawazun* (menyelaraskan sikap berkhidmah pada Allah SWT, dalam arti “kepentingan akhirat”, dan sikap pada kepentingan lingkungan untuk kemaslahatan hidup di dunia), Sikap yang selalu ber-*Amar*

Ma'ruf Nahi Munkar untuk mendorong dirinya dan orang lain agar berbuat baik serta meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji.

Keempat sikap kemasyarakatan dimaksud, oleh sebagian massa NU harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Meskipun, tidak banyak dipahami oleh massa NU dari PKB, namun seringkali dijadikan dasar pijakan dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketaatan masa NU PKB, dilaksanakan pada tataran kehidupan masyarakat di berbagai wilayah/daerah di Kota Tasikmalaya, begitu jelas tampak pada proses kepemimpinan simbolik para ulama/kyai NU dari PKB yang mempengaruhi massa NU PKB, untuk melakukan hak pilihnya pada pemilu legislatif dengan memberikan dukungan kepada kandidat yang disebut dan ditetapkan oleh ulama/kyai yang menjadi panutan/pemuka agama/tokoh masyarakat di lingkungan massa NU PKB.

Sehingga yang terjadi adalah dominasi suara terhadap kandidat legislatif di tempat pemungutan suara yang tidak jauh dari lingkungan wilayah tempat tinggal ulama/kyai dimaksud. Berbeda dengan lingkungan massa NU PPP, pada lingkungan massa NU PKB, banyak massa NU PKB pada tempat pemungutan suara yang memberikan dukungannya kepada kandidat yang berasal dari partai yang sama yaitu PKB, meskipun orang atau kandidatnya tidak dikenal oleh massa NU PKB di lingkungannya, namun karena ketaatan kepada sang ulama atau kyai yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat tersebut, massa NU PKB, cenderung untuk memberikan dukungan dan sikap politiknya kepada orang/kandidat yang secara simbolik terdapat ikatan emosional yang sama yaitu PKB.

Peristiwa tersebut terjadi di Daerah Pemilihan III (Cibeureum, Tamansari dan Purbaratu), yang merupakan basis massa NU terbesar di Kota Tasikmalaya, baik calon dari PPP maupun calon dari PKB, mendapat dukungan cukup banyak, jika di banding dengan perolehan suara calon dari partai lain. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara ikatan emosional, ikatan primordial massa NU dengan kandidat, disamping itu ada memori yang melekat pada massa NU terhadap kandidat yang dipilihnya. Fadillah Putra (2003:200). Sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sikap dan perilaku masyarakat pemilih di beberapa tempat di Dapil I sampai dengan Dapil IV Kota Tasikmalaya misalnya, banyak dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan akan bersifat positif. Begitu juga sebaliknya, bila sikap politik ditunjukkan negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkannya bersifat negatif. Suatu sikap politik tergantung pada beberapa hal,

yakni ideologi dari aktor, organisasi, budaya-budaya yang hidup di lingkungan aktor sikap politik tersebut.

Pada Dapil I Kota Tasikmalaya terdapat calon dari PKB yang hanya memperoleh 31 suara, ini menandakan bahwa kandidat tersebut tidak banyak berperan ataupun mungkin saja tidak mampu menyentuh, tidak dikenal oleh konstituennya, atau karena alasan seperti tersebut di atas, yaitu hanya mengumbar janji, tidak dekat dengan massa nahdiyyin, figuritasnya kurang disenangi atau karena sikap massa nahdiyyin yang skeptis terhadap calon tersebut, sehingga perolehan suaranya hampir sama dengan pemilihan di wilayah Rukun Tetangga (RT) di berbagai tempat.

Kandidat lain misalnya adalah pengasuh atau pengurus salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tawang. Beliau adalah warga nahdiyyin, namun karena dicalonkan dari partai lain di luar PPP dan PKB. TPS yang dekat dengan tempat tinggalnya dan masih berada di lingkungan pondok pesantren tersebut, tidak banyak memperoleh dukungan massa NU atau pemilih lain di luar warga nahdiyyin. Kurangnya simpati pemilih terhadap calon dimaksud dikarenakan sikap dan perilaku kandidat yang diusung partai lain, karena partai tersebut oleh pemilih di lingkungannya dipandang sebagai partai yang bukan partainya kaum nahdiyyin.

Pada kegiatan pra Pemilu atau pada masa kampanye di Kota Tasikmalaya, semua parpol baik yang berbasis massa Islam maupun NU semuanya bergerak untuk merangkul para kyai dan pesantren dari kalangan kelompok tersebut. Baik dilakukan oleh Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, PPP, PKB maupun PKS. Artinya massa NU menjadi pusat perhatian kandidat dan parpol untuk melakukan pendekatan dan mencari dukungan serta restu dari para Kyai. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh berbagai hal yang mempengaruhi pergeseran sikap politik massa NU di Kota Tasikmalaya, yang dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergeseran sikap yang lebih dominan, yaitu;

Faktor Figuritas Kyai

Figuritas Kyai dan nama besar Pesantren menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi terjadinya pergeseran sikap politik massa NU baik massa NU pendukung (simpatisan/massa) yang berafiliasi kepada PPP maupun PKB Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Peran kyai pada Pemilu legislatif 2014 menjadi episentrum seluruh kandidat dari berbagai parpol peserta pemilu legislatif, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan para kandidat kepada para kyai yang memiliki pengaruh besar di masyarakat pemilih, dilakukan dengan berbagai macam cara.

Kendati demikian, tidak seluruh kandidat yang datang ke kyai dapat diakomodir permintaan dukungannya untuk memperoleh suara di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Berdasarkan pengamatan kami dan hasil wawancara dengan berbagai pengurus pondok pesantren yang dipandang memiliki pengaruh besar di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pihak pesantren dan kyai mengakomodir kandidat dari berbagai parpol yang memiliki visi yang sama dengan Pondok Pesantrennya, namun demikian permintaan dukungan dari Kyai pemilik Pondok Pesantren, langsung direspon dan dijanjikan akan mendapatkan

suara banyak bagi seseorang kandidat, karena adakalanya Kyai menyerahkan sepenuhnya kepada santri dan masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren untuk menentukan pilihannya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Pondok Pesantren lainnya, peran Kyai sangat dominan ketika kandidat yang diakomodir mendapat dukungan penuh dari Kyai dan santrinya serta warga masyarakat yang berada di lingkungan pesantrennya.

Misalnya di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Kawalu, kandidat yang berasal dari parpol di luar PPP dan PKB mendapat dukungan dari Kyai dan santrinya serta warga masyarakat di lingkungan pesantren dengan perolehan suara yang cukup banyak dan mengalahkan kandidat yang berasal dari PPP dan PKB. Alasannya cukup rasional, bahwa kandidat dimaksud adalah orang NU dan berdomisili di dekat pesantren tersebut serta sering memberikan dukungan atau bantuan terhadap pesantren dimaksud, meskipun yang bersangkutan diusung oleh partai di luar PPP dan PKB.

Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh kyai dalam memenangkan calon ataupun kontestan dalam pemilu atau pemilukada memiliki pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itulah, posisi kyai menjadi magnet yang menjanjikan pihak konstituen dalam mempengaruhi massa nya, termasuk massa NU di Tasikmalaya. Sebagai Ormas yang memiliki massa terbanyak di Tasikmalaya, para kyai NU juga menjadi tujuan para calon untuk memuluskan kemenangannya dalam pemilu ataupun pemilukada.

Figuritas Kandidat atau Calon

Figuritas kandidat legislatif baik untuk tingkat pusat, provinsi maupun tingkat Kota Tasikmalaya, menjadi perhatian besar semua kalangan, hal ini dikarenakan marketing politik yang dilakukan oleh kandidat dari berbagai parpol mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan kalangan. Baik dari aspek pemasaran dan sosialisasi kandidat kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik lokal, *banner*, spanduk, baligo dengan jargon politik yang beraneka ragam. Kesemuanya memberikan pengaruh psikologis terhadap masyarakat luas, namun apakah pengaruh tersebut bersifat negatif atau positif, bergantung pada perspektif masing-masing calon pemilihnya.

Pada beberapa tempat pemilihan di empat daerah pemilihan, media yang dipakai untuk memasarkan dan mensosialisasikan kandidat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak banyak mempengaruhi perolehan suara atau dukungan dari pemilih di daerah pemilihannya masing-masing. Kandidat yang berhasil memperoleh dukungan suara banyak, ternyata di tentukan oleh seberapa besar pengaruh figuritas atau popularitas yang dicapai yang diketahui oleh konstituennya atau oleh masyarakat lainnya. Keterpilihan seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang diinginkan pemilih, artinya pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan atas seberapa besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok pemilih. Seberapa besar syarat-syarat kandidat terpenuhi secara umum seperti ; kapabilitas, intelektual, kepemimpinan, etika dan moral.

Kejelasan tentang visi dan misi serta program yang disampaikan kandidat, apakah pemilih memahami akan visi dan misi dan program yang disampaikan seorang kandidat sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat banyak atau tidak. Jika hal tersebut di atas tidak dipenuhi oleh seorang kandidat, maka pemilih pada suatu saat akan beralih sikap dan orientasinya ke kandidat lain. Syarat-syarat seperti tersebut di atas, akan sulit diketahui oleh calon pemilih, ketika calon/kandidat tidak dikenal secara langsung atau bertatap muka langsung dengan masyarakat pemilih. Sikap dan orientasi pemilih massa NU dari simpatisan/kader/pengurus PKB, sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Morgan dan King, bahwa sikap dan orientasi calon pemilih didasarkan atas komponen kognitif, afektif dan kecenderungan tindakan.

Lingkungan Hidup Masyarakat

Lingkungan hidup masyarakat, baik di tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun tingkat Rukun Warga (RW)/Kedusunan, ternyata memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan orientasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Domisili atau tempat tinggal pemilih ternyata memiliki ciri khas masing-masing yang didasari oleh homogenitas dan heterogenitas warga masyarakatnya. Di wilayah Kecamatan Cihideung dan Tawang terutama di lingkungan pusat kota, sikap politik pemilih lebih ditentukan pada faktor kebebasan individunya, karena di lingkungan ini sebagian besar pemilih adalah pemilih rasional dan skeptis. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kandidat yang kurang memahami sikap dan budaya politik warga masyarakat dimaksud.

Oleh karena itu, kandidat yang memiliki hubungan sosial ekonomi yang baik dan memiliki kedekatan emosional karena keterikatan obyek tertentu, yang memperoleh dukungan suara yang banyak dari pemilih di lingkungan warga masyarakat dimaksud. Namun, hal ini berbeda dengan wilayah atau lingkungan di Kecamatan Cihideung dan Tawang daerah pinggiran, yang mayoritas pemilihnya bersifat homogen etniknya.

Politik Simbol

Massa Nahdiyyin baik dari PKB maupun PPP masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh para kyai dalam lingkungan kehidupannya. Dalam tradisi warga Nahdiyyin, kyai merupakan pribadi yang memiliki istimewa. Pendapat kyai menjadi rujukan utama dalam proses sosial kemasyarakatan maupun dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah agama maupun masalah sosial dan politik. Sosok kyai Nahdiyyin, menurut warga Nahdiyyin adalah sosok pewaris Nabi.

Oleh karena itu, sikap massa Nahdiyyin dalam hal-hal tertentu menyandarkan segala sesuatunya tergantung apa yang disampaikan kyai. Massa nahdiyyin, sampai sekarang masih melekat dengan simbol pakaian yang sering dipakai para kyai yaitu, *baju gamis/haramain, sorban, tasbeh*, termasuk simbol non verbal seperti cium tangan warga nahdiyyin/santri kepada kyai, *tabaruq* (untuk mendapat berkah), dan

nilai-nilai dalam peribadatan seperti *maulid Nabi, Rajaban, Qunut, Sholawat, Marhabanan, istighosah* dan lain sebagainya.

Simbol dan nilai tersebut secara tersirat dijadikan sebagai pembanding dan pembeda dalam proses sosial kemasyarakatan dan proses politik. Artinya, warga nahdhiyin akan menilai parpol atau calon yang akan maju dalam pemilu legislatif, apakah memiliki kesamaan dengan simbol dan nilai-nilai yang dianut warga nahdhiyin atau tidak. Jika terdapat kesamaan sikap politik yang sama dengan warga nahdhiyin yang diaktualisasikan dalam simbol dan nilai-nilai yang dianut warga nahdhiyin, maka warga nahdhiyin sangat terbuka dan memberikan respon positif terhadap calon dimaksud. Namun sebaliknya apabila tidak ada kesamaan sikap politik, simbol dan nilai-nilai yang dianut warga nahdhiyin, maka warga nahdhiyin tidak akan meresponnya.

Model Kepemimpinan Kyai Nahdlatul Ulama dalam Mengelola Massa NU PKB dan PPP di Tasikmalaya

Kajian kepemimpinan tradisional kyai Nahdlatul Ulama dalam mempengaruhi pergeseran sikap politik massa NU PKB dan massa NU PPP di Tasikmalaya di dalamnya membahas mengenai pola terbentuknya pemimpin tradisional, relasi kuasa antar pemimpin tradisional tersebut. Seperti yang ditulis oleh Koentjaraningrat (Ibid:194), kepemimpinan yang dimaksudkan dalam analisis ini adalah sebagai keseluruhan upaya pemimpin dalam mengelola komunitasnya akan berjalan efektif, jika memenuhi unsur-unsur kepemimpinan yang dapat diterima oleh khalayak di masyarakat tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah dari mana sumber kewenangan pemimpin, bagaimana juga kewenangan tersebut yang diberikan masyarakat, kemudian bagaimana proses wewenang akan semakin kuat jika ditambah pengakuan atau legitimasi dari sebagian besar bahkan keseluruhan anggota atau komunitas masyarakat yang bersangkutan melalui kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan fisik maupun non-fisik. Selain kekuatan satu hal lagi yang menjadikan pemimpin sempurna dalam memainkan peran-peran kepemimpinannya adalah memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh sebagian besar anggota atau komunitas masyarakat atau populer di “mata” masyarakatnya.

Kepemimpinan kyai NU di Tasikmalaya sesungguhnya merupakan pemimpin bagi sekelompok masyarakat yang beragama Islam dan rata-rata ber Organisasi Kemasyarakatan NU. Selain tokoh bagi kalangan NU, biasanya juga tokoh bagi khalayak masyarakat ramai. Tokoh tersebut dianggap memiliki sejumlah kualifikasi yang mampu mencitrakan dirinya sebagai figur yang dianggap pintar mengaji, memahami Al-Qur'an dan Hadits, dianggap memiliki pemahaman ke-Islaman melebihi manusia biasa. Biasanya juga tokoh Kyai selain secara informal menjadi tokoh di masyarakat, yang bersangkutan aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan, dengan menjadi actor di lembaga seperti MUI, guru, dosen, bahkan politisi.

Sebagai contoh figur tokoh yang kami wawancarai, KH. Didi Hudaya, yang sebenarnya merupakan pimpinan salah satu pondok pesantren terkemuka di Kota

Tasikmalaya, beliau juga merupakan tokoh di sekitar tempat tinggalnya yaitu di kecamatan Cibeureum, namun beliau juga pernah menjadi politisi sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PKB. Melalui peran dan ketokohan yang dimainkannya tokoh ini menjelma menjadi sosok yang kharismatik dan mampu mempengaruhi khalayak, khususnya massa NU. Sumber kewenangan kyai Didi ini sesungguhnya didapatkan dari ketokohan dan kharisma yang terbentuk dalam jangka waktu lama. Sebagai kyai besar di Tasikmalaya, kebesaran tokoh ini tidaklah didapat dengan serta merta, namun melalui berbagai proses, baik penempatan di pesantren, organisasi ke NU an dari tingkat pelajar sampai kemahasiswaan, juga beliau juga sebagai pemimpin pesantren dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam pembangunan fisik, syiar Islam dan pendidikan di kalangan Nahdiyyin Kota Tasikmalaya.

Tidak jauh berbeda dengan kasus di Kabupaten Tasikmalaya. Tokoh sentral seperti KH. Nurcholis Tisnawan (alm, Ketua PC NU) di masa hidupnya merupakan sosok yang sangat kharismatik dan disegani pengikutnya. Dalam konteks mengajar di pesantren tokoh ini dikenal sangat otoriter, begitu juga kyai Didi Hudaya. Pak Muttaqin (Wakil Ketua PC NU Kabupaten Tasikmalaya saat ini) dianggap sosok yang kharismatik dan dominatif. Namun diakui oleh tokoh seperti H. Didi dan KH. Muttaqin bahwa terhadap masyarakat umum, warga NU baik yang pendukung PKB maupun PPP sangat membebaskan mereka untuk memilih.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, baik dari PKB maupun PPP, para kyai mereka dianggap memiliki kelebihan-kelebihan yang layak disebut sebagai seorang kyai. Sebutan ini juga lazim digunakan sebenarnya untuk menyebut tokoh agama Islam hampir semua tempat di Indonesia, dengan ciri-ciri memiliki tingkat kepehaman keagamaan di atas muslim lainnya dan juga memiliki akhlak yang dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat lainnya. Selain itu juga tokoh seperti K.H Didi Hudaya pernah menjadi pejabat pemerintahan daerah yang mengurus salah satu hal yang sangat vital bagi urusan kemasyarakatan, yakni membuat regulasi seperti peraturan daerah dan anggaran. Peran-peran tersebutlah yang menjadikannya sebagai salah satu pemimpin sentral di NU.

Dari uraian di atas terlihat bahwa, proses menjelmana seorang pemimpin tradisional dalam komunitas NU di Tasikmalaya lebih ditentukan oleh penerimaan masyarakat yang secara lambat laun, karena kualitas-kualitas tertentu yang diperlukan oleh masyarakat komunitasnya. Masyarakat Islam yang ber-Ormas Nahdatul Ulama di Tasikmalaya menganggap kyai mereka layak menjadi pemimpin masyarakat Islam, dengan memberikan amanah untuk mengajar mengaji anak-anak, remaja bahkan dewasa, anggota masyarakat, memimpin ritual keagamaan dan lainnya, bahkan kewenangan juga pada gilirannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut, namun mengalami eskalasi ke wilayah publik lainnya seperti menjadi penengah dalam persengketaan antar anggota masyarakat (*problem solver*), penasehat masyarakat, dan tokoh yang mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan.

Dalam kultur NU, khususnya yang berkembang di Tasikmalaya, tidak terdapat ketentuan khusus saat ini yang mengharuskan seorang pemimpin

tradisional, yakni kyai memiliki kemampuan fisik yang lebih dari manusia biasa. Namun, dari hasil observasi partisipan terlihat bahwa para pemimpin (kyai) merupakan tokoh yang menguasai berbagai ilmu di pesantren dan masyarakatnya masing-masing (ahli di komunitasnya). Tradisi di NU memang tidak mengharuskan seorang kyai adalah orang yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata dibanding masyarakat pada umumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan antaranya ada yang sudah mentradisi belajar kemampuan olah bela diri seperti silat sampai sekarang. Contohnya di Kabupaten Tasikmalaya kita mengenal tokoh seperti KH. Ubaidillah Ruhiat (Adik dari KH. Ilyas Ruhiat, Pesantren Cipasung) merupakan pemimpin dari lembaga bela diri silat Pagar Nusa NU tingkat Jawa Barat dan juga dikenal sebagai tokoh yang menguasai bela diri olah raga silat.

D. PENUTUP

Sikap politik massa NU PKB dan PPP di Tasikmalaya. Perbedaan dimaksud meskipun tidak dapat digeneralisasi, namun menjadi perhatian penulis terkait dengan ketaatan/loyalitas massa NU dari PKB, loyalitas dimaksud ialah ketaatannya pada ajaran bagi kaum nahdiiyin (yaitu empat bentuk sikap kemasyarakatan NU). Sikap *Tawassuth Wal-Itidal* (tengah-tengah dalam hidup bersama serta selalu jujur). Sikap *Tasamuh* (toleran dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat). Sikap *Tawazun* (menyelaraskan sikap berkhidmah pada Allah SWT, dalam arti “kepentingan akhirat”, dan sikap pada kepentingan lingkungan untuk kemaslahatan hidup di dunia). Sikap yang selalu ber-*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* untuk mendorong dirinya dan orang lain agar berbuat baik serta meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh berbagai hal yang mempengaruhi pergeseran sikap politik massa NU di Kota Tasikmalaya, yang dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergeseran sikap yang lebih dominan, yaitu faktor figuritas kyai, faktor lingkungan hidup masyarakat, Politik Simbol. Kajian kepemimpinan tradisional kyai NU dalam mempengaruhi pergeseran sikap politik massa NU PKB dan massa NU PPP di Tasikmalaya di dalamnya membahas mengenai pola terbentuknya pemimpin tradisional, relasi kuasa antar pemimpin tradisional tersebut. Model kepemimpinan ini diharapkan dan sangat diperlukan masyarakat, kepemimpinan kyai dapat memberikan amanah untuk mengajar mengaji anak-anak, remaja bahkan dewasa, anggota masyarakat, memimpin ritual keagamaan dan lainnya, bahkan kewenangan juga pada gilirannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut, namun mengalami eskalasi ke wilayah publik lainnya seperti menjadi penengah dalam persengketaan antar anggota masyarakat (*problem solver*), penasehat masyarakat, dan tokoh yang mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Dalam banyak diskusi dengan tim peneliti juga, kyai mencitrakan sebagai satu-satunya tokoh agama yang mampu mengendalikan kehidupan kemasyarakatan dan mencitrakan bahwa dirinya memiliki *power* paling besar, baik dalam mengatur kehidupan religi ke-Islaman, maupun kehidupan kemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Arief (ed), 1997, *Islam Demokrasi Atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A, dan Verba Sidney. 1990. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Feith, Herbeth dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. LP3ES : Jakarta.
- Fathoni, Khoirul dan Muh. Zen, 1992, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar*, S2-PLOD-JIP UGM, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono (ed), 1986, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- _____, 1997, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, Nung 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Penerbit Rake Sarakan, Jakarta.
- Mulyana, Deddy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchtar, Nadjid, dkk., 2007, *Islam Ahlussunah wal Jamaah di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, Pustaka Ma'arif NU, Jakarta.
- Sutopo, H., 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif: dasar-dasar teoritis dan praktis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Priyanto dan Trubus. 2004. *Etika Kemajemukan : Solusi Strategis Merenda Kebersamaan dalam Bingkai Masyarakat Majemuk*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Sumber Lain :**
- Agung, Subhan. 2011. *Relasi Kuasa Dalam Kepemimpinan Adat (Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat. dipublikasikan pada Aliansi Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol 3, Nomor 1, Januari 2011.*
- Hidayati, Nuri 2008, *Kontribusi Ustadz Bahrudin dalam Perkembangan Islam di Kampung Adat Kuta, Karapangpaningal, Ciamis, Jawa Barat (1981-1992)*, Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Kusmayadi, Edi, Satori, A, dkk.2010. *Tinjauan Sosial Budaya Politik dan Politik Masyarakat Adat Kampung Kuta Desa Karangpanigal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. Dipublikasikan pada Aliansi Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 2, Nomor 1, Januari 2010.
- _____.2010. *Budaya Politik Pesantren : Studi Kasus di Ponpes Miftahul Huda Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya*, Dipublikasikan pada Aliansi Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol 2. Nomor 2, Juli 2010.
- Rofik, Ahmad.2011.*Dinamika Perilaku Pemilih NU : Pasang Surut Suara NU Pada Pemilu Pasca Orde Baru*. Dipublikasikan pada Aliansi Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 3/No.1, Januari 2011.
- Satori, Akhmad dan Subhan Agung, 2011, *Kepemimpinan Politik Masyarakat Adat (Studi Model Pembagian Peran dan Relasi Kuasa Pemimpin Adat di Kampung Naga, Neglasari, Salawu, Tasikmalaya*. dipublikasikan pada Swara Politik Jurnal Politik dan Pembangunan. Vol 12, Nomor 2 Oktober 2011.
- Patton, Adri (1995), “Gaya Kepemimpinan yang Digunakan Pemimpin Informal (Ketua Adat) di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume 6, No.3, pp. 482